



## Pranatan Anyar



KR-Zaini Arrosyid

Pedagang Pasar Parakan, Temanggung membawa makanan dalam Selamatan Pasar Jumat Legi.

### PEDAGANG PASAR DI TEMANGGUNG Doa Selamatan Bebas dari Covid-19

TEMANGGUNG (KR) - Pedagang Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung, menggelar Doa Selamatan Pasar Jumat Legi agar pandemi Covid-19 segera berakhir dan aktivitas pasar segera normal kembali, Jumat (26/3).

Doa selamatan diikuti perwakilan pedagang, diawali pedagang berkeliling pasar dengan membawa tumpeng, lauk dan jajan pasar kemudian diletakkan di aula pasar. Pedagang duduk dengan menjaga jarak. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Setelah rangkaian doa bersama selesai, tumpeng dibawa ke kelompok masing-masing untuk dimakan bersama.

Kepala UPT Pasar Legi Parakan Ikhsan Hamdani mengatakan, pedagang Pasar Legi Parakan khususnya, masyarakat Temanggung dan bangsa Indonesia pada umumnya diharapkan segera terbebas dari pandemi Covid-19. "Mudah-mudahan bangsa ini segera dibebaskan dari pandemi Covid-19, pasar segera ramai dan para pedagang lancar rezekinya. Dengan bersyukur semoga rezeki para pedagang dili-

patgandakan oleh Allah SWT," ucapnya.

Doa bersama, kata Ikhsan, murni ide pedagang dan pihaknya hanya mengkoordinasi dan mendorong, karena sudah bisa dilakukan para pedagang di masing-masing sektor setiap Jumat Legi.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Sri Hariyanto menyampaikan penghargaan atas inisiatif selamatan sebagai wujud kerukunan dan kekompakan pedagang Pasar Legi Parakan. "Saya juga berterima kasih kegiatan ini atas inisiatif pedagang sendiri bekerja sama dengan UPT Pasar Legi Parakan. Hal ini salah satu bentuk kerja sama yang harus terus dibina dan dipupuk supaya kondisi pasar terasa *adhem, ayem, tentrem*. Insya Allah ketika pasar ini *adhem, ayem, tentrem*, rezeki mengalir dengan mudah," katanya.

Dikatakan, selamatan sangat banyak manfaatnya. Jika ada sesuatu yang dihindarkan sesungguhnya menjadi sarana supaya para pedagang dapat berkumpul dan bersepedak. (Osy)-f

## CAKUPAN WILAYAH DIPERLUAS Kriteria PPKM Mikro Diperketat

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menyampaikan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro akan terus ditingkatkan untuk mengefektifkan upaya pengendalian pandemi.

"Ke depan tentu kita akan terus tingkatkan, dan tadi arahan Bapak Presiden kriterianya diperketat. Jadi nanti sesudah tanggal 5 April 2021 kita akan memperketat kriteria dari PPKM Mikro ini," ujar Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Tindaklanjut Program Vaksinasi, di Istana Kepresidenan,

Jakarta, Jumat (26/3).

Untuk menjaga tingkat pengendalian kasus dan meningkatkan efektivitas pengendalian Covid-19 di tingkat nasional, Pemerintah telah memperpanjang pelaksanaan PPKM Mikro sejak 23 Maret lalu. Penerapan PPKM Mikro Tahap IV yang akan dilaksanakan hingga 5 April 2021 ini juga diperluas dari yang sebelumnya 10 provinsi menjadi 15

provinsi.

Ke-15 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, cakupan PPKM Mikro juga akan diperluas sesuai dengan parameter-parameter yang ada. "Arahan Bapak Presiden, PPKM Mikro ini akan terus ditambahkan kewilayahannya. Jadi sesudah nanti tanggal 5 April, kita akan menambahkan lima provinsi lagi berdasarkan data-data yang ada," ujarnya. (Sim)-d

## Serapan Vaksinasi di DIY Masih Rendah

YOGYA (KR) - Serapan vaksinasi Covid-19 tahap kedua di DIY masih rendah. Hal ini dapat berimbas pada suplai vaksin dari Pemerintah Pusat. Pada tahap kedua, Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY menargetkan 334.754 sasaran, dimana yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama baru 33,8 persen, sedangkan yang sudah mendapatkan dosis dua baru 14,38 persen. Untuk lansia dari target 295.349, baru 9,16 persen yang mendapatkan dosis satu dan 0,22 persen yang sudah mendapatkan dosis dua.

"Ini data per 25 Maret kemarin. Kalau untuk tahap pertama bagi tenaga medis, sudah selesai. Sekarang kita berupaya mempercepat pemenuhan target pada tahap kedua. Salah satunya dengan mengadakan vaksinasi massal," ujar Kadinkes DIY Pembajun Setyaningastutie da-

lam Forum Diskusi Wartawan Unit DPRD DIY, Jumat (26/3).

Sasaran vaksinasi massal, menurut Pembajun, masih petugas pelayanan publik dan lansia. Termasuk guru, pelaku pariwisata, UMKM. Untuk lansia, menurut Pembajun memang membutuhkan kehati-hatian. Pelaksanaannya disarankan ke rumah sakit atau Puskesmas.

Mengenai cadangan vaksin, saat ini masih ada 323 vaksin Sinovac di Gudang Farmasi Dinkes DIY. Dinkes DIY juga mendapatkan 8.740 vial yang akan didistribusikan ke kabupaten/kota serta suplai 1.530 vaksin AstraZeneca yang dikhususkan untuk TNI/Polri. "Kalau ketersediaan vaksin, aman. Kami mendapatkan dukungan penuh dari pusat. Suplai itu tergantung kecepatan kita dalam melakukan vaksinasi. Untuk itu kami

berupaya segera menyelesaikan vaksinasi pada tahap kedua ini," jelasnya.

Pembajun juga menjelaskan tentang tunda vaksin. Dari 278.268 target petugas pelayanan publik, 1.055 terpaksa tertunda vaksinasi dosis pertama. Sedangkan yang tertunda pada dosis kedua 49 orang. Untuk lansia, dari 27.066 sasaran, 211 tidak bisa mendapatkan vaksin dosis pertama. Sedangkan 302 pada dosis kedua semuanya lolos *screening*.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto memberikan tiga rekomendasi kepada Pemda DIY dalam hal percepatan penanganan kasus Covid-19, seperti pencegahan, penghentian penularan hingga pengobatan, percepatan pemulihan ekonomi, serta menjamin ketersediaan bahan pokok. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Puasa Ramadan. (Awh)-f

DARI 64,7 JUTA JADI 34 JUTA UNIT

## Dampak Pandemi, 50% UMKM Rontok

JAKARTA (KR) - Sepanjang masa pandemi Covid-19 berlangsung, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) rontok hingga lebih 50 persen, dari 64,7 juta unit (2019) menjadi 34 juta unit (2020). Merosotnya jumlah UMKM ini otomatis berkontribusi menurunkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"UMKM lebih terpukul lagi saat penerapan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), itu benar-benar melumpuhkan," kata Ketua Umum Asosiasi UMKM (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun dalam diskusi 'Mendorong Digitalisasi Keuangan dan UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional' (PEN), Jumat (26/3).

Pihaknya bersyukur pemerintah melalui program PEN, segera menyelamatkan sektor UMKM dengan berbagai insentif. Mulai dari penundaan

cicilan kredit, keringanan bunga, pembebasan bayar listrik dan insentif lainnya. "Meski agak terlambat tapi sudah sangat membantu," ujarnya. Sebelum pandemi, ada tiga sektor utama UMKM yang berkontribusi besar kepada PDB, yaitu sektor kuliner 35 persen, fesyen 22 persen dan kerajinan 17 persen. "Dalam keadaan normal kita bisa berkontribusi 60 persen pada PDB dan 95 persen penyerapan tenaga kerja," terang Ikhsan.

Dirinya sangat mendukung kam-

panye Presiden Joko Widodo dengan slogan 'benci produk asing' dengan tujuan agar masyarakat Indonesia mencintai produk dalam negeri, terutama produk UMKM yang terseok-seok saat pandemi.

Ikhsan berharap agar pemerintah semakin menaruh perhatian pada UMKM yang terkapar akibat pandemi. "Slogan Pak Jokowi cinta produk Indonesia. benci produk asing adalah statement yang membuka peluang bagi UMKM," seru Ikhsan.

Namun berkah dari pandemi adalah peningkatan penggunaan sistem digitalisasi pada pelaku UMKM. Dari catatan Akumindo, tahun 2017 ada 84 juta pengguna, 2018 naik 95,2 juta pengguna, 2019 melonjak 107,2 juta pengguna dan pada 2020 signifikan sebanyak 196,7 juta pengguna.

(Lmg)-f

### DUGAAN KORUPSI PENGADAAN 'QCC' Usai Diperiksa, KPK Tahan RJ Lino

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJL) dalam pengadaan 'Quay Container Crane' (QCC) di PT Pelindo II yang menyebabkan dugaan korupsi.

KPK, Jumat (26/3) menahan RJ Lino setelah sebelumnya ditetapkan dan diumumkan sebagai tersangka pada Desember 2015.

"Tahun 2009, PT Pelindo II melelang pengadaan tiga unit 'QCC' dengan spesifikasi *single lift* untuk cabang Pelabuhan Panjang Palembang dan Pontianak yang dinyatakan gagal, sehingga dilakukan penunjukan langsung kepada PT BI (Barata Indonesia)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta.

Namun, penunjukan langsung tersebut juga batal, karena tidak adanya kesepakatan harga dan spesifikasi barang tetap mengacu kepada standar Eropa. "Pada 18 Januari 2010, RJL selaku Direktur Utama PT Pelindo II diduga melalui disposisi surat memerintahkan FY (Ferialdy Noerlan) Direktur Operasi dan Teknik melakukan pemilihan langsung dengan mengundang tiga perusahaan, yaitu ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd) dari China, Wuxi HDHM (HuaDong Heavy Machinery Co Ltd) dari China dan Doosan dari Korea Selatan," ujar Alex.

Pada Februari 2010, lanjutnya, RJ Lino diduga kembali memerintahkan untuk dilakukan perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelindo II tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Pelindo II dengan mencabut ketentuan penggunaan komponen barang/jasa produksi dalam negeri. (Ful)-d

### Semua Calon Haji Akan Divaksin

SURABAYA (KR) - Semua jemaah calon haji akan divaksin Covid-19. Selain itu, bukan hanya kategori lanjut usia (lansia), yang akan menerima vaksin Covid-19.

Demikian kata Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas disela kunjungan dinasny di Surabaya, Jumat (26/3). "Kami sudah bicara dan bersurat kepada Menteri Kesehatan dan insyaallah semua jemaah calon haji yang akan berangkat dipastikan sudah divaksin," ujar Menag.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mensyaratkan siapa pun yang masuk ke negaranya harus sudah divaksin. "Vaksinasi dilakukan secepatnya. Target pada akhir Mei 2021 semua jemaah calon haji sudah divaksin," ucap Menag.

Vaksinasi untuk calon haji diberikan secara gratis sehingga pihaknya segera membahas dengan DPR RI agar pembiayaan tidak dibatalkan. "Kami belum berhitung dengan DPR. Itukan (soal pembiayaan, red.) harus berhitung dengan DPR, apakah ditambah atau tidak. Kalau toh ditambah, kami punya dana manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," katanya.

Oleh karena itu Menag mengatakan tentang pentingnya vaksinasi itu tidak memberatkan calon haji, terlebih terkait dengan pembiayaan.

"Jadi sebenarnya mekanisme semua bisa diatur supaya jemaah calon haji tidak terberatkan. Tunggu waktu saja bicara dengan DPR. Pemerintah tidak ingin jemaah diberatkan karena situasi pandemi sekarang sudah berat," tutur Yaquut.

Mengenai kapan pelaksanaan ibadah haji akan dibuka, Yaquut belum bisa memastikan karena menunggu informasi dari Kerajaan Arab Saudi.

Kendati demikian, Kemenag RI terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. (Ati)-d



KR-Antara/Hafidz Mubarak A/foc

Pedagang Cita Rahayu alias Cita Citata menyapa wartawan sebelum diperiksa di Gedung KPK.

### SAKSI KASUS SUAP BANSOS Cita Citata Sambangi Gedung KPK

JAKARTA (KR) - Penyanyi dangdut Cita Citata memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/3). Sebelumnya KPK memanggil Cita Citata sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Saat tiba di Gedung KPK Jakarta, sekitar pukul 14,30 WIB Cita Citata tidak memberikan pernyataan dan langsung menuju ke resepsionis untuk mengisi nomor pendaftaran. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya mengatakan, penyidik KPK memanggil Cita Citata, seorang penyanyi dangdut.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso/Pejabat Pembuat Komitmen) di Kemensos," jelas Ali Fikri dalam keterangannya, kemarin.

Selain Cita Citata, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Matheus, yakni Wempi dari pihak swasta/PT Guna Nata Dirga serta dua wiraswasta masing-masing Vijaya Fitriyasa dan Rachmad Sulomo.

Dalam sidang 8 Maret 2021 di Pengadilan Tipikor Jakarta, kesaksian Matheus menyebutkan, untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar

Maddanatha mengatakan *fee* sebesar Rp 14,7 miliar yang didapat dari berbagai perusahaan vendor bansos Covid-19 digunakan untuk operasional bansos, termasuk kebutuhan Juliari Batubara.

Selain itu, diberikan kepada para pejabat di Kemensos dan tim pengadaan bansos, pembayaran pengacara, pembayaran hotel, tes swab seragam baju tenaga pelopor, pembayaran penyewaan pesawat, pembayaran artis Cita Citata dan sebagainya.

Dalam kasus ini, selain Matheus, KPK masih melakukan penyidikan untuk dua tersangka penerima suap lainnya, yaitu mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos lainnya, Adi Wahyono (AW).

KPK juga memeriksa ahli komunikasi Effendi Ghazali sebagai saksi untuk tersangka PPK di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan kawan-kawan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya menyebutkan, Effendi dipanggil dalam kapasitas sebagai wiraswasta.

Effendi membantah terlibat dalam kasus tersebut. "Tadi sudah terbukti, nama saya tidak ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Matheus Joko," ucap Effendi. Ia juga membantah bahwa dirinya turut memiliki jatah kuota bansos. (Ful)-d